

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan makin pesatnya jumlah penduduk, kebutuhan sarana dan prasarana transportasi sangat dibutuhkan untuk mengimbangi berbagai aktifitas dari penduduk. Angkutan penumpang umum merupakan salah satu pilihan utama di wilayah antar kota di Indonesia. Angkutan umum merupakan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran mobilitas yang tinggi dan juga menunjang pergerakan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Salah satu daerah yang membutuhkan angkutan umum yaitu di Kota Yogyakarta (Laksono et al., 2015). Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang relatif fleksibel dan tarifnya terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

Fungsi utama dari angkutan umum adalah sebagai angkutan yang mengangkut pergerakan masyarakat untuk menjalankan aktifitas sehari-harinya yang diharapkan memiliki pelayanan secara aman, cepat, murah, nyaman, dan efisien. Penentuan besaran tarif angkutan membutuhkan kebijakan yang arif serta penanganan yang tepat, karena penentuan besaran tarif ini tentunya dapat menjembatani antara kepentingan penumpang selaku konsumen dengan pengusaha atau operator angkutan umum. Lemahnya daya beli penumpang menjadi alasan utama penundaan bahkan pembatalan perubahan tarif yang ada (Tantry et al., 2022).

Ketepatan penentuan tarif menjadi hal yang penting bagi perusahaan, karena ketepatan penentuan tarif mempengaruhi ketepatan harga jual atau jasa yang

diinformasikan. Tarif merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi perusahaan, maupun dapat menentukan seberapa jauh kualitas layanan jasa yang dinilai oleh konsumen dan proses pembangunan citra perusahaan. Keputusan mengenai penetapan harga tarif tidaklah mudah dilakukan. Perusahaan yang menetapkan tarif yang terlalu mahal bisa meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau konsumen dan sukar bersaing dengan competitor (Suliawati et al., 2021).

Dasar penetapan tarif yang dilakukan oleh pemerintah dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu : kondisi ekonomi masyarakat, biaya pemeliharaan atau suku cadang, harga bahan bakar, sarana dan prasarana, tingkat okupansi dan sebagainya (Azriadi et al., 2015). Hal ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dengan mutu jasa standar keselamatan, di satu pihak juga mempertimbangkan kemampuan dan kemauan daya beli pemakai (Ropika, 2018).

Dalam proses penentuan tarif angkutan umum, khususnya taksi reguler, diperlukan perhitungan yang adil dan transparan agar dapat mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak, yaitu operator dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Penetapan tarif harus mempertimbangkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) sebagai representasi biaya yang dikeluarkan oleh operator, serta *Ability to Pay* (ATP) sebagai indikator kemampuan masyarakat membayar tarif tersebut (Kemenhub, 2014). Tarif yang baik adalah tarif yang sesuai bagi pengguna kendaraan dan juga bagi operator kendaraan, mencakup biaya operasi kendaraan

dan keuntungan atau laba yang diharapkan operator, sesuai tingkat kemampuan membayar dari konsumen atau penumpang (Alamsyah & Fajriana, 2022).

Kota Yogyakarta terus mengalami pertumbuhan dan pergerakan yang sangat pesat, terutama pada bidang pariwisata. Pertumbuhan bidang pariwisata memberikan potensi pada sektor angkutan umum untuk mengangkut lebih banyak penumpang dari daerah satu ke daerah lainnya. Karakteristik mengenai pengguna jasa dan karakteristik perjalanan angkutan umum merupakan salah satu pengetahuan karakteristik utama dalam suatu perencanaan sistem angkutan umum (Suprayitno et al., 2006).

Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kajian terhadap komponen Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan *Ability to Pay* (ATP) salah satu nya untuk moda transportasi taksi reguler. Hasil kajian tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penetapan tarif melalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Tarif Taksi Reguler. Namun demikian, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi terkini seperti laju inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP), maka diperlukan evaluasi ulang terhadap relevansi data tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan tetap mencerminkan kondisi ekonomi aktual dan mampu mengakomodasi kepentingan baik dari sisi operator maupun masyarakat sebagai pengguna jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara data Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan *Ability To Pay* (ATP) tahun 2022 dengan kebijakan tarif taksi reguler DIY yang berlaku saat ini, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keberlanjutan operasional dan keterjangkauan bagi masyarakat

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, agar penelitian ini mencapai sasaran, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan *Ability to Pay* (ATP) masyarakat DIY tahun 2022 yang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif taksi reguler?
2. Apakah penggunaan data Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan *Ability To Pay* (ATP) tahun 2022 masih relevan dan layak digunakan sebagai dasar penetapan tarif taksi reguler pada SK Gubernur No. 41 Tahun 2025?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada taksi reguler di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data sekunder berupa hasil kajian Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan *Ability To Pay* (ATP) tahun 2022 dari Dinas Perhubungan DIY serta penyesuaian terhadap kondisi ekonomi tahun 2025. Variabel yang dianalisis meliputi Biaya Operasional Kendaraan (BOK), *Ability To Pay* (ATP), inflasi, UMP, dan harga BBM

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan kemampuan membayar masyarakat (ATP) tahun 2022 sebagai dasar perhitungan tarif taksi reguler..
2. Mengevaluasi relevansi dan kelayakan penggunaan data Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan *Ability To Pay* (ATP) tahun 2022 dalam penetapan tarif taksi reguler tahun 2025

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah DIY dalam evaluasi kebijakan tarif taksi reguler.
2. Menjadi referensi bagi operator taksi dalam menyusun strategi operasional berbasis biaya riil.
3. Memberikan kontribusi akademik dalam kajian transportasi publik berbasis data sekunder

1.6. Lokasi Studi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, lokasi pengambilan sampel difokuskan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perhubungan DIY sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan pengawasan transportasi di daerah tersebut.